

DINAMIKA MADRASAH DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM UNGGULAN

Syamsul Hadi HM

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail: syamsulhadihm@yahoo.co.id

Abstrak: Pendidikan Islam termasuk madrasah sebagai salah satu lembaga sosial tertua, dalam perkembangannya senantiasa mengalami dampak perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini terjadi dilatari penyesuaian lembaga pendidikan atas kebutuhan masyarakat dan keterakarannya dalam karakteristik masyarakat setempat. Di sisi lain dunia pendidikan di Indonesia ditandai oleh kehadiran tiga model kelembagaan yang secara substantif berbeda. Satu sisi terdapat model kelembagaan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan nalar rohaniyah dan di sisi lain model kelembagaan sekolah yang berorientasi pada nalar kognitif dan keterampilan kerja jasmaniah. Titik konvergensi dari kedua model tersebut ditemukan dalam bentuk dua varian, yaitu lembaga pendidikan diniyah yang mengadopsi elemen-elemen sekolah yang disebut madrasah dan lembaga pendidikan sekolah yang mengadopsi elemen-elemen diniyah yang disebut sekolah Islam.

Kata Kunci: Sistem penyelenggaraan, pendidikan Islam

Pendahuluan

Konfigurasi dunia pendidikan di Indonesia ditandai oleh kehadiran tiga model kelembagaan yang secara substantif berbeda. Satu sisi terdapat model kelembagaan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan nalar rohaniyah seperti pesantren dan diniyah, di sisi lain ada model kelembagaan sekolah yang berorientasi pada nalar kognitif dan ketrampilan kerja jasmaniah seperti sekolah. Titik konvergensi dari kedua model tersebut ditemukan dalam bentuk dua varian, yaitu lembaga pendidikan diniyah yang mengadopsi elemen-elemen sekolah yang disebut madrasah dan lembaga pendidikan sekolah yang mengadopsi elemen-elemen diniyah yang disebut “sekolah Islam“ seperti SD Islam, SMP Islam dan SMA Islam.

Tulisan ini selanjutnya akan menyajikan hasil kajian tentang madrasah yang meliputi: *Pertama*, pengertian dan sejarah singkat madrasah. *Kedua*, dinamika dan berbagai macam sistem penyelenggaraan madrasah. *Ketiga*, ciri khas madrasah, dan *Keempat*, masa depan madrasah: kekuatan, kelemahan dan peluang madrasah. *Kelima*, sekilas tentang sistem penyelenggaraan madrasah dan sekolah Islam unggulan.

Pengertian dan Sejarah Singkat Madrasah

Kata madrasah diambil dari akar kata *darasa* yang berarti “belajar”. Kata *madrasah* adalah *isim makan* dari kata ini sehingga berarti “tempat untuk belajar”. Istilah madrasah sering diidentikkan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam.¹ Secara umum madrasah juga sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya seperti kursi, meja dan papan tulis, kecuali aspek tradisi dan kurikulum yang dilaksanakan. Meskipun sekarang posisi madrasah secara yuridis sama terutama dalam aspek kurikulum,² tetapi madrasah secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas Islam.

Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Menurut Syalabi madrasah pertama kali didirikan pada tahun 459 H oleh Nizam al-Mulk di Baghdad,³ bahkan menurut Hasan Abd ‘Al madrasah telah lebih awal berdiri pada abad keempat *Hijriyah* di Naisabur. Munculnya pendidikan madrasah pada awalnya selain dilatarbelakangi oleh motivasi agama dan motivasi ekonomi, juga motivasi politik. Oleh sebab itu kelembagaan madrasah merupakan formalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap sistem pendidikan informil yang telah ada sebelumnya, sisi lain ialah adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah. Dengan demikian keberadaan madrasah pada waktu itu merupakan tonggak baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan pada masa-masa berikutnya, termasuk perkembangan pendidikan di dunia Barat. Sistem madrasah pertama kali didirikan dan diperkenalkan di dunia Islam adalah madrasah *Nidzamiyah* di Baghdad yang didirikan oleh perdana menteri Nidzamul Mulk (1018/1019-10992), seorang

¹ Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta, Logos, 1999), 12.

² Baca Permendiknas no. 22, 23, 24 tahun 2006

³ Ahmad Syalabi, *History of muslim education* (Beirut, Dar Alkasasyaf, 1987), 43.

penguasa Bani saljuk pada abad II yang salah seorang gurunya adalah Imam Ghazali,⁴ kemudian sistem madrasah ini berkembang ke berbagai kota di negeri Islam antara lain di Kairo (Mesir) berdiri perguruan al-Azhar, di Spanyol berdiri perguruan Cordoba dan di India berdiri madrasah Deoban. Abd Ghani Abud⁵ mengatakan “pendirian universitas-universitas di Barat adalah sebagai hasil inspirasi dan pengaruh madrasah (Nidzamiyah)”. George Makdisi⁶ juga membuktikan, bahwa tradisi akademik Barat secara historis mengambil banyak keuntungan dari tradisi madrasah.

Di Indonesia, madrasah merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Tidak ada kejelasan hubungan madrasah abad ke 11-12 di Timur Tengah dengan munculnya madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia, jika dikembalikan pada situasi awal abad ke-20, dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, walaupun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah masa modern. Hal tersebut seperti ditegaskan IP Simanjuntak⁷ bahwa masuknya agama Islam tidak mengubah hakekat pengajaran agama yang formil, yang berubah ialah isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, serta latar belakang pelajar-pelajar, jadi masih tetap menganut pola Hindu. Sejalan dengan itu penelitian Karel Steenbrink⁸ mengindikasikan bahwa pendidikan Islam berevolusi dari pesantren, madrasah dan kemudian sekolah, sebab itu madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Keberadaan madrasah seperti sekarang ini merupakan akumulasi berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia. Mulai dari tradisi pra sejarah atau tradisi asli, tradisi Hindu-Budha, tradisi Islam, dan tradisi barat atau modern.⁹ Oleh sebab itu madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif, dan

⁴ Baca Ensiklopedia Islam, 1994, 3.

⁵ Maksum, *Madrasah*, 75

⁶ dalam *Studia Islamica* 32: 197, 255-264

⁷ IP Simanjuntak, *Pembaharuan Pendidikan Islam*. 1972/1973, 24.

⁸ Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Cet. 2 (Jakarta: LP3ES, 1984), 32.

⁹ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), 19.

dalam waktu yang cukup panjang itu telah memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa.

Sebelum terbentuk sistem madrasah, pada awalnya proses pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di masjid dan pesantren. Setelah terbuka dan semakin kuatnya proses pembentukan “*Intellectual Webs*” (jaringan intelektual) di kalangan umat Islam dengan *Haramain* sebagai sumber tempat yang “asli”, nuansa mistik yang kental di pondok pesantren lambat laun semakin berkurang dan bergerak ke arah proses ortodoksi, atau oleh pengamat peradaban di Indonesia menyebut adanya proses bergerak dari Islam yang bercorak “mistik” menuju ke Islam “*Sunni*”.¹⁰ Di sisi lain juga terjadi proses perubahan isi pembelajaran di dalam format-format pembelajarannya. Persentuhan “global” dengan pusat Islam di *Haramain* memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka tumbuh dan berkembanglah pola pembelajaran pelajaran Islam yang dikelola dengan sistem “*Madrasah*”.

Dari sini dapat diketahui bahwa madrasah yang kita temukan di Indonesia bukanlah suatu yang *indigenius* (pribumi) dalam peta dunia pendidikan di Indonesia, dan juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata “*madrasah*” itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, secara harfiah kata ini setara maknanya dengan “sekolah”. Berbeda dengan pesantren, yang oleh para peneliti/ilmuwan dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenius*.¹¹

Dilihat dari pengelolaannya, pendidikan sistem madrasah ini memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang lebih bersifat individual seperti yang terdapat pada sistem *sorogan* dan *wetonan*. Pengelolaan sistem *madrasi* juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaiannya dilakukan secara bertingkat-tingkat. Pengelompokan ini sekaligus memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan. Sehingga secara teknis, sistem *madrasi* berusaha mengorganisasikan kegiatan kependidikannya dengan sistem kelas-kelas berjenjang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelajaran yang sudah dipolakan.

¹⁰ Fadjar, *Madrasah*, 22.

¹¹ Fadjar, *Madrasah*, 20.

Format madrasah dari waktu ke waktu semakin jelas sosoknya, sementara isi dan visi keIslaman terus mengalami perubahan, seiring dengan semakin kuatnya kontak dengan dunia luar terutama dengan negara-negara Islam dan juga dipengaruhi oleh kolonialisasi di nusantara ini yang berabad-abad lamanya.

Dinamika dan Sistem Penyelenggaraan Madrasah

Sebuah momentum yang umumnya dianggap melegakan kalangan madrasah terjadi pada tahun 1975. sebagai penjabaran dari Keppres No. 34 tahun 1972 dan Ipres N0. 15 Tahun 1973 dalam bentuk usaha peningkatan mutu madrasah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Mentri, yaitu Mendikbud, Mentri dalam Negeri, dan Mentri Agama No.6 tahun 1973, No. 037/U/1976 dan No.36 tahun 1975. Inti dari SKB tersebut adalah agar secara lintas departemental dilakukan usaha bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah sehingga tingkat kualitas pengetahuan umum siswa madrasah bisa mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum siswa sekolah umum yang sederajat. SKB menetapkan bahwa standar pelajaran umum pada madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Umum dan agama.

Kebijakan SKB tiga menteri tersebut, pada dasarnya ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena ia hanya berkuat pada kajian keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga *output* nya pun kurang diperhitungkan dalam masyarakat. Dengan munculnya SKB tiga menteri, rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan Nasional. Hanya saja pengaruh dari SKB tersebut belum banyak ditangkap oleh para pembina dan pengelola madrasah itu sendiri. Posisi 70 % pengetahuan umum dan 30 % pengetahuan agama hanya dipahami secara simbolik-

kuantitatif dan bukan substansial-kualitatif,¹² sehingga *outputnya* menjadi mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak jauh berbeda.

Di sisi lain pengaruh SKB 3 Menteri tersebut secara formal madrasah telah mengalami restrukturisasi, yaitu dari orientasi *tafaqquh fiddin* kepada orientasi ketenagakerjaan yang tidak berbeda dengan sekolah umum biasa. Dengan kata lain madrasah bukan lagi tempat memberikan pendidikan dan pengajaran, yang agama Islam menjadi pokok pengajarannya, melainkan sebagai “sekolah umum di bawah pengelolaan Departemen Agama”. Dengan kualitas dan kuantitas tenaga, sarana, prasarana, fasilitas, dan dana yang jauh lebih rendah dibanding sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional, madrasah bernasib hidup dan berkembang sebagai sekolah marginal. Semua janji penyediaan guru bidang studi umum, sarana, prasarana, fasilitas termasuk alat-alat dan buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional umumnya tidak terealisasi. Inilah sebuah ironi pencerahan yang dialami oleh madrasah.¹³

Hal lain yang perlu dicatat adalah melalui SKB 3 Menteri 1975, di satu sisi pemerintah telah berusaha “Memodernisasi” madrasah, namun disisi lain juga telah berdampak pada mandeknya kaderisasi ulama. Tujuan Menteri Agama Prof. Mukti Ali untuk mencetak ulama dan intelektual yang ulama jauh baranya daripada api. kualitas madrasah dinilai serba tanggung. Pengetahuan umum tidak menguasai, pengetahuan agama tak tahu banyak. Keadaan ini berlangsung terus hingga akhir ini (atau bahkan sampai sekarang). Sadar akan akutnya persoalan madrasah, terutama menyangkut pengkaderan ulama (program *tafaqquh fiddin*).

Sebagai akibat dari kedangkalan pengetahuan agama dari lulusan madrasah terutama kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keIslaman, maka pada tahun 1987 Menteri Agama Munawir Sjadzali memprakarsai proyek penyelenggaraan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) dengan kurikulum yang padat agama dan bahasa (Arab dan Inggris) serta pembelajaran yang

¹² Muhaimin, “Eksistensi Madrasah sebagai Sekolah Umum yang Berciri Khas Islam”, *Tarbiyah*, IAIN Malang, no. 45 tahun xiv, Januari-Maret, 1997.

¹³ Muhaimin, *Eksistensi Madrasah*, 21-39

intensif dengan sistem asrama seperti pesantren (kebanyakan memang dilaksanakan di MAN pesantren). Mula-mula dibuka di 5 (lima) tempat: Padang Panjang, Ciamis, Yogyakarta, Jember dan Ujung Pandang. Pada tahun 1990 dibuka lagi di Lampung, Surakarta, Mataram dan Martapura. Dengan seleksi ketat dan pendanaan memadai (didukung proyek), MAPK dinilai telah berhasil menyiapkan lulusan kader ulama dengan wawasan keIslaman, keIndonesiaan, dan kemoderenan yang lumayan (Suwendi, 2006: 8).¹⁴ Berkaca dari hasil MAPK, desakan masyarakat untuk membuka lebih banyak MAPK mengalir deras. Untuk merespon desakan itu, melalui keputusan Menteri Agama No. 371 tahun 1993, restrukturisasi madrasah dilakukan lagi yaitu dengan mengubah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Secara substansial, antara MAPK dengan MAK tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali beban kurikulum MAPK lebih berat ketimbang MAK. Dari segi operasional, MAPK didukung oleh proyek, sedang MAK tidak, disamping itu dengan keputusan Menteri Agama itu Kanwil Depag diberi wewenang membuka MAK sesuai kebutuhan. Maka jumlah MAK menjadi semakin banyak dan massif. Namun sayang, penambahan jumlah yang sangat besar ini tidak dibarengi dengan dukungan dana, sarana, prasarana, dan tenaga yang memadai. Akibatnya, ada kecenderungan kualitas MAK mengalami degradasi yang semakin lama semakin buruk dan pada gilirannya, minat masyarakat juga menurun drastis bahkan sejumlah MA akhirnya harus rela undur diri dari penyelenggaraan program tafaqquh fiddin karena tidak lagi mendapat murid.

Dalam pada itu, keluarnya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas (UUSPN 2003) yang mengatur tentang jenis pendidikan, penyelenggaraan dan penjurusan tidak memberikan indikasi yang jelas tentang apa, bagaimana dan dimana status hukum dan legalitas MAK.

Dan sebagai akibat dari kemandulan keilmuan yang dimiliki output madrasah, maka pada masa periode Tarmidzi Taher sebagai menteri Agama, mencoba menawarkan kebijakan “*Madrasah sebagai sekolah yang berciri khas Islam*” yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non Madrasah.

¹⁴ Suwendi

Sebagaimana tertuang dalam kurikulum madrasah tahun 1994, bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Ciri khas itu berbentuk (1) mata pelajaran-mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam, yaitu: al-Qur'an hadits, aqidah akhlak, fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa arab; (2) suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan; dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia, di samping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Kini, posisi madrasah sudah benar-benar sama dan sejajar dengan sekolah pada umumnya, karena pemerintah melalui PP no 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas No 22, 23, 24 tahun 2006, telah memberikan standarisasi baik isi, proses, pengelolaan dan penilaian terhadap semua bentuk dan jenis pendidikan formal di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi baik yang berupa sekolah umum maupun madrasah.

Berdasarkan arah dan bentuk pengembangannya, madrasah dikategorikan dalam 4 (empat) jenis yaitu: *Pertama*, madrasah biasa yakni madrasah yang berjalan seperti biasa, sederhana dan dilakukan apa adanya, madrasah dalam bentuk ini sangat banyak jumlahnya yang tersebar di seluruh propinsi. *Kedua*, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yakni madrasah yang menitik beratkan pada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan. *Ketiga* madrasah ketrampilan, yakni madrasah yang menitik beratkan pada pengembangan *skill* atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu, sama halnya dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan *keempat*, madrasah model yakni madrasah yang memiliki standar tertentu dari segi sarana prasarana jumlah dan kualifikasi tenaga guru dan lain-lainnya untuk dijadikan model atau percontohan agar dapat mengimbas pada madrasah-madrasah lain.

Sampai saat ini jumlah madrasah di Indonesia cukup signifikan, yaitu sebanyak 72.650 buah, tetapi dari sekian ribu madrasah tersebut sebagian besar kondisinya masih cukup memprihatinkan. Sebab itu menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan inovasi dan pengembangan lembaga madrasah ini karena

keberadaannya sebagai sub sistem pendidikan nasional mempunyai peran yang sama dengan lembaga pendidikan lain, yakni berusaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Menurut H.A.R. Tilaar¹⁵ perlu diupayakan reposisi pendidikan madrasah agar sesuai dengan paradigma baru tuntutan dan harapan masyarakat dan pembangunan bangsa. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan (baik pendidikan umum maupun madrasah) telah banyak dilakukan seperti: (1) kegiatan belajar mengajar; (2) manajemen pendidikan yang efektif dan efisien; (3) buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisii siap pakai; (4) fisik dan penampilan sekolah yang baik; dan (5) partisipasi aktif masyarakat.¹⁶

Di samping kelima komponen peningkatan mutu pendidikan tersebut, dilakukan pula penunjang peningkatan mutu keluaran melalui kebijakan pemerintah seperti sistem *link and match* dengan sasaran memberi kaitan dan ketersepadanan antara sistem pendidikan nasional dengan tuntutan kebutuhan pembangunan. Di jajaran Perguruan Tinggi Agama Islam juga dilakukan inovasi pendidikan seperti pembentukan madrasah model yang memiliki standar tertentu dari segi sarana, prasarana, jumlah dan kualifikasi guru, serta murid yang terseleksi sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan intensitas yang tinggi.¹⁷

Dalam rangka menelaah kualitas pendidikan nasional tentu tidak terlepas dari usaha-usaha dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan inovasi dalam rangka memperbaharui sistem pendidikan nasional tersebut. Inovasi pendidikan yang dimaksudkan adalah pengembangan dan perubahan sistem pendidikan yang lebih baik dan berdayaguna dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahasan selanjutnya difokuskan pada tiga pokok kajian yaitu kualitas pendidikan, inovasi pendidikan dan implikasi manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Di lingkungan Pergurais Depag madrasah dikembangkan melalui beberapa cara, secara khusus seperti Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada tahun 1950-1960

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, cet-4 (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2000), 164-179.

¹⁶ Ditjenbimbagais. *Startegi Pembelajaran Kurikulum Madrasah 1994* (Jakarta: Ditjenbimbagais. Depag RI, 1997), 53

¹⁷ Fadjar, *Madrasah*, 43

yang diorientasikan di pedesaan sebagai penerapan isu pembangunan masyarakat pedesaan (*Rural Development*) MWB ini berlangsung selama delapan tahun, yaitu kelas 1 sampai 6 sebagai madrasah ibtidaiyah dan kelas 7 dan 8 sebagai kelas kemasyarakatan. Di kelas kemasyarakatan para murid diberi pengetahuan, watak dan keterampilan yang menjadikan mereka siap terjun kemasyarakat.

Madrasah unggul direkomendasikan kepada madrasah tertentu yang dinilai memiliki keunggulan akademik, sarana dan prasarana sampai keunggulan minat daya beli dan dukungan aktif masyarakat. Madrasah-madrasah ini dijadikan percontohan dan pusat studi banding bagi madrasah-madrasah lainnya. Madrasah unggul ini diberikan keistimewaan dalam melakukan upaya pengembangan sesuai dengan karakteristik unik yang dimilikinya.¹⁸

Madrasah model merupakan pengadopsian proyek PEQIP, bedanya proyek ini dibantu oleh ADB dan dikembangkan di beberapa daerah khusus, seperti di Jawa Timur dipusatkan di Wilayah Lamongan, Bangkalan, dan Tranggalek yang dikembangkan pada jenjang pendidikan dasar (*Basic Education*) maupun pada jenjang menengah (*Madrasah Aliyah Quality Improvement Project*).

Terakhir perintisan madrasah model terpadu yang mencoba memadukan aspek fasilitas fisik, manajemen dan kurikulum madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi satu kesatuan, *integrated*, yang ditopang oleh para pakar pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan partisipasi masyarakat. Madrasah ini diproyeksikan sebagai langkah antisipatif menghadapi wajib belajar 12 tahun dan telah dirintis pada tujuh madrasah negeri, yang berada di Aceh, Padang, Palembang, Jambi, Jakarta, Yogyakarta dan Malang (MIN, MT's & MA Jalan Bandung).¹⁹

Madrasah sebagai Sekolah Umum yang Berciri Khas Agama Islam

Meskipun madrasah memiliki posisi dan kedudukan yang sama dengan sekolah umum, tetapi madrasah tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah Islam. Sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam dituntut untuk selalu mengadakan upaya-upaya pengembangan dengan konteks zamannya, terutama dalam

¹⁸ Fadjar, *Madrasah*, 33.

¹⁹ Ditjenbinbagais, *Strategi Pembelajaran*.

menghadapi kebijakan pembangunan Nasional di bidang pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan secara utuh, tidak parsial atau setengah-setengah, semuanya diorientasikan untuk menciptakan manusia yang berkualitas yang ditandai dengan kepemilikan dua kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi bidang Iman dan Taqwa (IMTAQ)) dan kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Ciri khas yang masih dipertahankan oleh madrasah adalah berbentuk (1) mata pelajaran-mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam, yaitu: al-Qur'an hadits, aqidah akhlak, fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa arab; (2) suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah, penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan; dan kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlak mulia, disamping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Dengan ciri khas tersebut pendidikan madrasah dirancang dan diarahkan untuk membantu, membimbing, melatih serta mengajar dan/ atau menciptakan suasana agar para siswa (lulusannya) menjadi manusia muslim yang berkualitas. Dalam arti mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup yang perspektif Islami dan kontek ke-Indonesiaan. Makna pendidikan Islami sebagai aktivitas (formal dan non formal) dan sebagai fenomena peristiwa (informal) semuanya termuat dan perlu terkondisikan di madrasah. Pemahaman manusia berkualitas dalam khazanah pemikiran Islam sering disebut sebagai *insan kamil*,²⁰ yang mempunyai sifat-sifat: manusia yang selaras (jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi), manusia *nazhar* dan *I'tibar* (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan) serta manusia yang memakmurkan bumi.

Jika ditelaah lebih mendalam ciri khas agama Islam tersebut di atas, maka pada ciri khas yang *pertama*, mengandung makna bahwa pendidikan agama Islam di madrasah bukan hanya didekati secara keagamaan, tetapi juga didekati secara keilmuan. Pendekatan keagamaan mengasumsikan perlunya pembinaan dan

²⁰ Zarkowi Soejoeti, *Khazanah Pemikiran Pendidikan Islam* (t.tp, t.p, 1987), 63.

pengembangan komitmen (pemihakan) terhadap ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup muslim. Sedangkan pendekatan keilmuan mengasumsikan perlunya kajian kritis, rasional, obyektif-empirik dan universal terhadap masalah keagamaan Islam.

Kedua pendekatan tersebut akan sulit tercipta di madrasah bilamana tidak didukung oleh komitmen akademis-religius atau personal dan profesional religius dari para pengelola dan pembinanya. Bisa jadi pendekatan keilmuan akan tertindih oleh pendekatan keagamaan, sehingga penjabaran mata pelajaran pendidikan agama Islam ke dalam sub-sub mata pelajaran tersebut akan kehilangan makna. Jika demikian maka tidak ada bedanya antara pendidikan agama Islam yang dilakukan di madrasah dengan non madrasah, atau dengan di masyarakat atau di masjid dan mushalla, dan jika memang demikian adanya maka sebaiknya diserahkan saja pendidikan agama itu kepada masjid-masjid atau TPA-TPQ, majlis *ta'lim* di masjid, mushalla dan seterusnya. Atau sebaliknya bisa jadi pendekatan keagamaan tertindih oleh pendekatan keilmuan, sehingga pendidikan agama Islam menjadi Islamologi yang hanya menekankan pada *intellectual exercise* dan suasana religius tidak tercapai di madrasah. Dengan demikian gagal menjadikan madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.

Pada ciri khas yang *kedua*, mengandung makna perlunya penciptaan suasana religius di madrasah. Suasana religius bukan hanya bermakna simbolik seperti dalam berpakaian siswanya (puteri) memakai jilbab dan siswa putera memakai celana panjang, bila berjumpa dengan orang lain mengucapkan salam (*assalamu'alaikum*) dan seterusnya, tetapi lebih jauh dari itu berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius (ke-Islaman) pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam program pendidikannya. Konsekuensinya diperlukan guru-guru yang mampu mengintegrasikan wawasan IMTAQ dan IPTEK, diperlukan buku teks yang bernuansa religius dan bermuatan pesan-pesan agamis pada setiap bidang atau mata pelajaran yang diprogramkan.

Masa Depan Madrasah: Kekuatan, Tantangan dan Peluang

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah memegang peran penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik, karena melalui pendidikan madrasah ini para orang tua berharap agar anak-anaknya memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya (IMTAQ). Oleh sebab itu jika kita memahami benar harapan orang tua ini maka sebenarnya madrasah memiliki prospek yang cerah.

Di sisi lain, jika dilihat dari kesejarahannya, madrasah memiliki akar budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat, sebab itu madrasah sudah menjadi milik masyarakat. Apabila dewasa ini banyak ahli berbicara tentang inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola masyarakat (*community based management*), maka madrasah dan termasuk juga pesantren merupakan model dari pendidikan tersebut.

Akan tetapi, menurut Malik Fadjar²¹ dari sekian puluh ribu madrasah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini sebagian besar masih bergumul dengan persoalan berat yang sangat menentukan hidup dan matinya madrasah, sehingga nilai tawar semakin rendah dan semakin termarginalkan.

Fadjar ketika mengamati madrasah mencatat empat persoalan umum yang menjadi penurunan kualitas madrasah yaitu (1) kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai; (2) sarana fisik dan fasilitas pendidikan yang minim; (3) manajemen non profesional; (4) jumlah murid yang sedikit dan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kesimpulan Fajar ini relevan dengan hasil evaluasi Dirjen Bimbas tentang penerapan kurikulum 1994 yang masih lemah pada tiga unsur pokok dalam proses pembelajaran yaitu (1) kurikulum yang dinilai yang terlalu sarat, kurang fungsional dan kurang proporsional; (2) sumberdaya pendidikan yang lemah di bidang sumberdaya manusia sarana prasarana dan pembiayaan/dana; (3) rendahnya kualitas pembelajaran disebabkan kurangnya penerapan metodologi dan teknologi

²¹ Fadjar, *Madrasah*, 35.

pengajaran, motivasi dan semangat, serta pengembangan kreativitas guru yang belum kondusif.

Banyak tantangan yang mesti dihadapi madrasah. *Pertama*, selama ini *image* masyarakat tentang madrasah masih kurang baik. Produk madrasah masih dianggap kurang berkualitas, khususnya dalam ilmu pengetahuan umum. Hal ini mengharuskan madrasah tetap komitmen memperbaiki mutu pendidikan khususnya pendidikan umum tersebut. *Kedua*, masih adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (atau pemikiran dokmatis), sehingga terjadi istilah-istilah dan praktek pendidikan sebagai berikut: a) konsep *'abdullah* lebih dominan ketimbang *kbolifatullah*, sekolah lebih menampakkan praktek *punishment* dari pada *reward*, lebih berorientasi kepada *hablum minallah* dari pada *hablum minannas*, lebih dominannya budaya kata (*bil maqol*) dari pada perbuatan (*bil hal*), berpikir rasional lebih dikalahkan oleh pendekatan emosional, penemuan empiris dibatalkan oleh ramalan-ramalan, etos seringkali dikalahkan oleh mitos, masih ada kebiasaan memisah dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal. *Ketiga*, diberlakukannya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang telah menempatkan posisi madrasah ekuivalen dengan kelembagaan pendidikan nasional pada umumnya (SMP umum dan SMA), menempatkan kedudukan madrasah sebagai sekolah umum (yang berciri khas Islam). Hal ini mengandung arti bahwa peserta didik madrasah sederajat dengan peserta didik di SMP dan SMU umum. Kondisi ini mengharuskan madrasah menghasilkan produk yang cerdas, terampil, dan bertaqwa.

Keempat, diberlakukannya kurikulum baru tahun 2006 (KTSP), yang memberlakukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa Madrasah secara keseluruhan, baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama, telah disamakan dengan siswa SMP dan SMU umum. Di mana alokasi jumlah jam untuk mata pelajaran agama di madrasah pun berkurang. Hal ini mengkhawatirkan guru-guru madrasah tidak dapat memberikan layanan maksimal dalam pengajaran bidang ilmu-agama. Kondisi tersebut mengharuskan madrasah mencari solusi yang tepat agar dapat menghasilkan produk yang unggul dalam ilmu-ilmu agama.

Fenomena di atas setidaknya disebabkan dan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kaitannya dengan problem internal kelembagaan dan *parental choice of education*, bahwa popularitas dan marginalitas lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga pendidikan bersangkutan mampu merespon dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan seberapa jauh lembaga bersangkutan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal kelembagaan ke arah profesionalitas penyelenggaraan pendidikan.

Kaitannya dengan problem internal kelembagaan, bahwa problem internal madrasah yang selama ini dirasakan, seperti dikatakan Malik Fadjar meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja madrasah, kualitas dan kuantitas guru, kurikulum, dan sarana fisik dan fasilitasnya. Problem semacam itu, seperti yang dipaparkan Imam Suprayogo, karena posisi madrasah berada dalam lingkaran setan, sebuah problem yang bersifat *causal relationship*; dari problem dana yang kurang memadai, fasilitas kurang, pendidikan apa adanya, kualitas rendah, semangat mundur, inovasi rendah, dan peminat kurang, demikian seterusnya berputar bagai lingkaran setan.

Di sisi lain, kaitannya dengan *parental choice of education*, menurut A. Malik Fadjar²² bahwa dalam masyarakat akhir-akhir ini terjadi adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Menurutnyanya, kini masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan ketrampilan dalam konteks waktu sekarang. Di sisi lain, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun manusia (*human and capital investmen*) untuk membantu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sekaligus mempunyai kemampuan produktif di masa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya.²³ Pergeseran tersebut menurut Ahmad watik Pratiknya (dalam Fadjar, 1999, hal. 77) mengarah pada; *Pertama*, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di bidang ilmu

²² Fadjar, *Madrasah*, 76

²³ Suryadi, Ace, dkk.. *Indikator Mutu Dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta. Balitbangdepdikbud. 1992 & H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 46.)

pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih fungsional, dimana hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata. *Ketiga*, masyarakat padat informasi, dan *keempat*, kehidupan yang makin sistemik dan terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang terbuka (*open system*).

Sesuai dengan ciri masyarakat tersebut, maka pendidikan yang akan dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis, fungsional, individual, informatif dan terbuka. Dan yang lebih penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama.

Dengan melihat problem internal kelembagaan madrasah seperti dijelaskan di atas, dikaitkan dengan *parental choice of education*, dimana masyarakat semakin kritis, pragmatis, terbuka dan berpikir jauh ke depan dalam melakukan pilihan pendidikan bagi anak-anaknya, maka pendidikan madrasah akan tetap berada pada posisinya sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”, “marginal” yang hanya diminati masyarakat bawah dan tidak atau kurang dilirik oleh masyarakat menengah atas (*upper middle class*), sebaliknya jika madrasah secara internal dikelola dengan sistem manajemen profesional dan mampu memahami dan merespon tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut, maka madrasah akan memperoleh peluang yang lebih besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi masyarakat.

Sejalan dengan statemen di atas, berdasarkan pengamatan A. Malik fadjar bahwa semakin terpelajar masyarakat semakin banyak aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan. Dan sebaliknya, semakin awam masyarakat semakin sederhana pertimbangannya dalam memilih lembaga pendidikan atau barangkali, bahkan hanya sekadar menjadi makmum dengan kepercayaannya. Menurutnya, ada tiga hal yang paling tidak menjadi pertimbangan masyarakat terpelajar dalam memilih suatu lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka, yaitu cita-cita dan gambaran hidup masa depan, posisi dan status sosial, serta agama. Dalam kaitan ini, jika madrasah atau lembaga pendidikan Islam lainnya memenuhi ketiga kreteria di atas, maka akan semakin diminati oleh masyarakat

terutama masyarakat terpelajar, tetapi sebaliknya, banyak lembaga pendidikan Islam yang akan semakin meminggir posisinya karena tidak menjanjikan apa-apa.

Kesan marginalitas madrasah, sebenarnya lebih banyak disebabkan karena sebagian besar madrasah lebih berorientasi pada kerakyatan (*populis*), pendidikan hanya dijadikan sebagai fungsi “cagar budaya” dan pada saat bersamaan ia mengabaikan kualitas dan prestasi, sebab itu penyelenggaraan pendidikan cenderung dilakukan secara konvensional, apa adanya, manajemen non-profesional, stagnan dan *status quo*, dan pada akhirnya pendidikan semacam ini ditinggalkan oleh masyarakat dan hanya diminati kelompok masyarakat bawah.

Akan tetapi dewasa ini persepsi atau pemahaman masyarakat tentang madrasah sudah mengalami pergeseran sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara makro yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan barunya. Pada awalnya madrasah dipahami sebagai sekolah yang hanya mengajarkan agama tetapi sekarang ini persepsi masyarakat sudah berubah bahwa ternyata madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah umum lainnya karena memiliki kurikulum yang sama, di sisi lain madrasah dianggap sebagai sekolah umum plus agama. Perubahan persepsi dan pemahaman tersebut seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara makro, madrasah dianggap sebagai sekolah agama ketika kurikulum madrasah masih berbanding 70% agama dan 30% umum, tetapi ketika terjadi perubahan dimana madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah umum dan memiliki kelebihan yakni “identitas ke-Islaman”, maka madrasah kemudian dianggap sebagai sekolah umum plus yang memiliki nilai lebih dibanding dengan sekolah umum.

Jika dilihat dari kecenderungan atau gejala sosial baru yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang mereka harapkan, maka sebenarnya madrasah memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan. Kecenderungan tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya mobilitas sosial yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Kelas menengah baru senantiasa memiliki peran besar dalam proses transformasi sosial, di bidang pendidikan misalnya

akan berimplikasi pada tuntutan terhadap fasilitas pendidikan yang sesuai dengan aspirasinya baik cita-citanya maupun status sosialnya. Karena itu lembaga pendidikan yang mampu merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat ini.

Kedua, munculnya kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses re-Islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan. Terjadinya santrinisasi masyarakat elit tersebut akan berimplikasi pada tuntutan dan harapan akan pendidikan yang mengaspirasikan status sosial dan keagamaannya. Sebab itu pemilihan lembaga pendidikan didasarkan minimal pada dua hal tersebut, yakni status sosial dan agama.

Ketiga, arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif. Modernisasi dengan berbagai macam dampaknya perlu disiapkan manusia-manusia yang memiliki dua kompetensi sekaligus; yakni Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan (IMTAQ). Kelemahan di salah satu kompetensi tersebut menjadikan perkembangan anak tidak seimbang, yang pada akhirnya akan menciptakan pribadi yang pincang (*split personality*), sebab itu potensi-potensi insaniyah yang meliputi kedua hal tersebut secara bersamaan harus diinternalisasi dan dikembangkan pada diri anak didik. Arus globalisasi dan modernisasi tersebut akhirnya berimplikasi pada tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang disamping dapat mengembangkan potensi-potensi akademik ilmu pengetahuan dan teknologi juga internalisasi nilai-nilai religiusitas.

Kecenderungan di atas harus segera direspon oleh madrasah jika lembaga ini tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat. Di samping itu madrasah juga harus dapat membaca alasan-alasan dan pertimbangan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Alasan masyarakat memilih lembaga pendidikan paling tidak didasarkan pada lima kategori sebagai berikut:

Pertama, alasan teologis. Alasan ini didasarkan pada kecenderungan global sekarang ini dimana nilai-nilai agama dan moralitas menjadi taruhan seiring dengan

arus globalisasi tersebut, sebab itu orang tua berfikir agar bagaimana di tengah arus globalisasi tersebut sejak dini anak-anak sudah dibentengi dengan moralitas dan agama.

Kedua, alasan sosiologis. Berdasarkan alasan ini pemilihan lembaga pendidikan adalah didasarkan pada seberapa jauh lembaga pendidikan dapat memenuhi peran-peran sosiologis; peran alokasi posisionil berupa kedudukan dan peran penting dalam kehidupan sosial; memungkinkan terjadinya mobilitas sosial; peran mengukuhkan status sosial; dan peran untuk meningkatkan prestise seseorang di masyarakat.

Ketiga, alasan fisiologis. Alasan ini didasarkan pada faktor-faktor eksternal yang bersifat fisik, seperti; letak dan kondisi geografis, bangunan fisik, lingkungan pendidikan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan, dan seterusnya.

Keempat, Alasan akademis. Alasan ini didasarkan pada prestasi dan performa lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional. Performa dan profesionalitas pengelolaan lembaga pendidikan akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik, dan lembaga pendidikan yang mempunyai prestasi yang tinggi, bagi masyarakat terpelajar, akan dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan unggul, favorit dan menjadi pilihan masyarakat.

Kelima, Alasan Ekonomis. Alasan ini didasarkan pada tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh orang untuk pembiayaan pendidikan di lembaga bersangkutan. Bagi masyarakat menengah ke bawah permasalahan biaya menjadi masalah penting, sebaliknya bagi masyarakat elit tingginya biaya pendidikan kadang menjadi ukuran bahwa lembaga pendidikan tersebut unggul, elit, prestise, dan menjanjikan.

Ada beberapa tawaran lain yang ditawarkan Hadi²⁴ yang mungkin dapat dijadikan bahan renungan. *Pertama*, bila keterbatasan jam pelajaran ilmu agama jadi kendala, mungkin bisa menjadi alternatif bila seluruh suasana madrasah (*school culture*) dijadikan wahana bagi pendidikan keagamaan. Lebih ditingkatkan lagi pembiasaan yang berhubungan dengan pendidikan agama, misalnya untuk membaca al-quran sebelum pebelajaran dimulai, diberlakukannya standar hafalan Alquran, melaksanakan

²⁴ Syamsul Hadi, *Menguak Dinamika Pendidikan Islam*. Makalah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Malang. 2008, 6.

salat duha, melaksanakan salat wajib berjamaah, melaksanakan puasa sunat Senin-Kamis bersama-sama, memperingati hari-hari besar agama dll. Atau lebih singkatnya menyatukan antara *knowing-doing* dan *bieng* dalam proses belajar mengajar di sekolah/madrasah. *Kedua*, sebagian pelajaran agama dijadikan ekstrakurikuler yang wajib diikuti seluruh siswa, misalnya pelajaran BTQ (baca tulis al-qur'an), pelajaran hafalan al-quran dan doa-doa khusus, pelajaran praktik ibadah. Madrasah sebagai sekolah agama harus dapat memberikan pengayaan muatan agama, memberikan penekanan sangat serius pada kemampuan membaca al Quran, karenanya kepada setiap siswa diharuskan memiliki kemampuan membaca al Quran yang baik. Bagi siswa yang belum memiliki kemampuan membaca al Quran yang baik diharuskan mengikuti kegiatan Bina Baca al Quran (BBQ). Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar dibawah koordinasi kelompok guru mata pelajaran agama.dll. *Ketiga*, harus berani membenahi kurikulum, dengan cara memodifikasi kurikulum. Guru yang mengasuh pelajaran yang linier harus mencari padanan SK/KD yang sama, sehingga SK/KD yang akan diajarkan tidak tumpang tindih. Maka pada muatan kurikulum akan terjadi pengurangan-pengurangan jam, dan dapat ditambahkan pada mata pelajaran lain yang lebih dibutuhkan oleh siswa.

Keempat, merangkul orang tua untuk bekerja sama melakukan terapi penyempurnaan pembelajaran bidang agama melalui belajar lagi di rumah, oleh orang tua, atau memanggil guru ngaji, belajar di madrasah diniyah sore ataupun menjadi santri di pondok pesantren.

Secara khusus, terdapat beberapa upaya yang mungkin dapat dijadikan alternatif untuk peningkatan kualitas pendidikan Madrasah antara lain, Madrasah perlu membenahi kurikulum, tetap berkomitmen menjadi tempat pembelajaran yang nyaman dan baik, lebih selektif dalam penerimaan siswa baru.

Sekilas Sistem Penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah Islam Unggulan

1. Konsep Madrasah dan Sekolah Islam Unggulan

Dalam konsep yang sesungguhnya, madrasah/sekolah Islam unggul adalah madrasah/sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal untuk

menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh dengan berasaskan pemahaman keislaman/aqidah Islam.

Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata "unggul" (*excellent*) melainkan *effective, develop, accelerate, dan essential*. Sementara secara struktur formal kualitas suatu sekolah lebih dikenal sebagai teori *Effective School*²⁵ yang sering pula disebut *good school, succes school, excellent school* atau *high performance school*.²⁶

Teori-teori tentang sekolah efektif biasanya difokuskan pada perbaikan proses pendidikan yang memiliki indikator-indikator tertentu seperti; lingkungan sekolah yang aman dan tertib, perumusan visi, misi dan target mutu yang jelas, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, harapan prestasi yang tinggi, pengembangan staf sekolah yang terus menerus, evaluasi belajar untuk penyempurnaan PMB, dan komunikasi serta dukungan orang tua dan masyarakat. Ketujuh indikator ini merupakan persyaratan minimal bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kinerja sekolah dan prestasi murid sesuai dengan tujuan dan target pendidikan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator ini dikemukakan oleh para ahli secara variatif yang didasarkan dari hasil-hasil penelitian pada sekolah yang baik atau efektif.²⁷

Sejalan dengan itu, Direktorat pendidikan dasar Ditjenbimbagais²⁸ menetapkan lima komponen sebagai syarat pendekatan pendidikan *whole school development* yang meliputi kegiatan belajar mengajar, manajemen pendidikan efektif, buku dan sarana belajar memadai, fisik dan penampilan yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan Arifin ditemukan 10 karakteristik dari profil sekolah yang berprestasi yaitu; (1) fasilitas belajar baik dan eksklusif; (2) layanan akademik yang khusus dan baik; (3) perencanaan yang baik; (4) iklim kerja yang sehat dan baik; (5) motifasi berprestasi dan semangat kerja yang tinggi; (6) menerapkan guru kelas dan bidang studi; (7) bekal dasar murid berupa

²⁵ Sergiovanni. *The Principalship: A Reflective Practice perspective* (Boston: Allyn and Bacon. Inc, 1987), 25.

²⁶ Sergiovanni dan Elliot, 1975, Frymier dkk. 1984; Scheerens, 1992, Arifin 1998.

²⁷ Scheerens, *JEffective Schooling: Research, Theory, and Parctice* (New York: Cassell, 1992)

²⁸ *Strategi Pembelajaran Kurikulum Madrasah* (Jakarta: Ditjenbimbagais Depag RI, 1994), 55.

pendidikan prasekolah; (8) harapan yang tinggi disertai dengan dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarakat sekitar; (9) keterlibatan wakil kepala madrasah dan guru-guru; (10) kepala madrasah yang efektif.²⁹

Para pakar pendidikan memiliki variasi dalam menentukan parameter Madrasah/sekolah Islam unggul, biasanya dalam studi itu dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Hoy & Ferguson³⁰ mengemukakan dua model teoritik yaitu pencapaian tujuan pendidikan dan pencapaian sistem manajemen pendidikan. Selain pendekatan tersebut, Robbin³¹ juga melengkapinya dengan pendekatan respon lingkungan yang positif.

Keunggulan madrasah/sekolah yang diukur dari pencapaian tujuan pendidikan digambarkan melalui perolehan *output* yang tinggi dalam akademik. Indikasi keberhasilan ini telah dikembangkan pusat pendidikan dan pengembangan sistem pengujian yang mengukur secara baku hasil belajar melalui Ebtanas.³² Perolehan akademik ini dijadikan indikator bahwa tujuan pendidikan telah tercapai (*goal attainment*). Penelitian yang dilakukan *The Seattle Public School*, Washington pada 1982³³ menemukan bahwa sekolah yang unggul ditandai dengan kemampuan murid menguasai, prestasi akademik maksimal pada semua mata pelajaran, dan menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistematis. Penelitian yang dilakukan Gibbon melalui proyek *School Improvement Program* (SIP) di Columbus, Ohio pada tahun 1983-1984 juga menggunakan kriteria prestasi akademik murid sebagai pencapaian kualitas pendidikan. Namun demikian, kriteria kualitas pendidikan yang diukur semata-mata dari prestasi akademik memiliki tiga kelemahan, yaitu: (1) mendefinisikan kualitas sangat sempit karena diukur dari dimensi akademik saja; (2) kriteria ini hanya mementingkan hasil murid dari pada proses; (3) unsur-unsur kualitas lain cenderung terabaikan. Oleh

²⁹ Imron Arifin, "Strategi Pengelolaan MI Unggulan: Analisis Evaluatif dalam Menyusun Perencanaan Strategik MI Unggulan". *Jurnal Pendidikan*. 1999, 41- 49

³⁰ Hoy, W.K. & Ferguson, J. *A Theoretical Framework An Explanatory of Organizational Effectiveness of School Administrations Quarterly*, XXI, (2) 117-132.

³¹ Robbins, S.P, *Organization Theory: The Structure and Design of Organizations* (Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1983).

³² Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung: Rosdakarya, 1992)

³³ dikutip Arifin, I. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Berprestasi: Studi Multi Kasus MIN Malang I, MI Manbaul ulum, dan SDN Ngalik I Batu*. Malang: PPS IKIP Malang, 1995.

karena itu penulis menyarankan seharusnya pencapaian tujuan harus diukur melalui *out-put* secara menyeluruh seperti: kualitas, inovasi, prestasi siswa dari segi akademik dan non akademik termasuk nilai ebtanas dan juara lomba, produktivitas, prestasi seni, olah raga, karya ilmiah dan lain-lain

Sedangkan keunggulan pendidikan yang dilihat dari keefektifan sistem ditekankan pada proses dan kondisinya seperti berjalan secara baik pola pengambilan keputusan, sistem supervisi, kedisiplinan, proses komunikasi,³⁴ termasuk juga kehidupan kerja, moral kerja, monitoring dan evaluasi dan hal-hal lainnya. Penelitian Ace Suryadi³⁵ tentang kualitas pendidikan dilihat dari hasil kualitas proses belajar mengajar, yang dipengaruhi pula oleh faktor *input* yang meliputi kualitas guru, murid, dan manajemen.

Sisi lain dari kualitas pendidikan diukur oleh beberapa pakar melalui respon positif lingkungan dalam memberi pengharapan kepercayaan, pengakuan, dan dukungan positif terhadap lembaga pendidikan tertentu. Penelitian Corner dan Got membuktikan bahwa pendidikan yang berkualitas memberikan layanan yang baik dan memperoleh respon dan dukungan positif dari lingkungan sekitarnya.

Penelitian yang menggunakan ketiga aspek, yaitu pencapaian tujuan, pendekatan sistem dan respon lingkungan telah dilakukan oleh Arifin³⁶ yang secara utuh melihat kualitas pendidikan dari ketiga aspek tersebut yaitu (1) prestasi akademik dan non akademik tinggi sebagai kriteria kualitas keluaran; (2) sistem manajemen dan kepemimpinan yang efektif sebagai kriteria sistem atau proses; (3) pengakuan dan dukungan positif masyarakat. Apabila ketiga aspek ini terpenuhi maka pendidikan dapat dikatakan berkualitas tinggi dengan ditandai terjadinya perbaikan proses belajar mengajar bagi para guru dan murid, diiringi dukungan positif dari komunitas eksternal terhadap lembaga pendidikan tersebut.

³⁴ Owens. R.G, *Organization Behavior In Education* (Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall. 1987)

³⁵ Ace Suryadi, *Indikator Mutu*, 67.

³⁶ Arifin, I. "Strategi Pengelolaan MI Unggulan: Analisis Evaluatif dalam Menyusun Perencanaan Strategik MI Unggulan." *Jurnal Pendidikan*, 26, (1), 1999, 41-49.

Berbicara tentang mutu pendidikan Islam menurut penulis ada tiga *mazhab* tentang mutu yakni (1) mazhab tujuan; (2) mazhab proses dan (3) mazhab komprehensif (*input-proces-output-outcome*).

2. Analisis Kritis tentang Sistem Penyelenggaraan Madrasah/Sekolah Unggulan

Negeri ini sedang berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum memuaskan. Kini upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh dengan membuka sekolah-sekolah unggulan. Sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah unggulan diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul yang amat berguna untuk membangun negeri yang kacau balau ini. Tak dapat dipungkiri setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi manusia unggul. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan. Setiap tahun ajaran baru sekolah-sekolah unggulan dibanjiri calon siswa, karena adanya keyakinan bisa melahirkan manusia-masnesia unggul. Benarkan sekolah-sekolah unggulan kita mampu melahirkan manusia-manusia unggul?

Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggul (*excellent*) melainkan *effective, develop, accelerate, dan essential*. Sementara secara struktur formal kualitas suatu sekolah lebih dikenal sebagai teori *Effective School* yang sering pula disebut *good school, succes school, excellent school* atau *high performance school*. Di Indonesia, dari sisi ukuran muatan keunggulan, sekolah unggulan di Indonesia juga kurang memenuhi syarat. Sekolah unggulan di Indonesia hanya mengukur sebagian kemampuan akademis. Dalam konsep yang sesungguhnya, sekolah unggul adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh-kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi.

Madrasah unggul direkomendasikan kepada madrasah tertentu yang dinilai memiliki keunggulan akademik, sarana dan prasarana sampai keunggulan minat daya beli dan dukungan aktif masyarakat. Madrasah-madrasah ini dijadikan percontohan dan pusat studi banding bagi madrasah-madrasah lainnya. Madrasah unggul ini diberikan keistimewaan dalam melakukan upaya pengembangan sesuai dengan karakteristik unik yang dimilikinya.³⁷

Madrasah/Sekolah Islam unggul yang sebenarnya dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya oleh pemegang otoritas pendidikan. Dalam konsep sekolah unggulan yang saat ini diterapkan, untuk menciptakan prestasi siswa yang tinggi maka harus dirancang kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru yang berkualitas tinggi. Padahal sekolah unggulan yang sebenarnya, keunggulan akan dapat dicapai apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. Berarti tenaga administrasi, pengembang kurikulum di sekolah, kepala sekolah, dan penjaga sekolah pun harus dilibatkan secara aktif. Karena semua sumber daya tersebut akan menciptakan iklim sekolah yang mampu membentuk keunggulan sekolah.

Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur organisasi pada sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dan bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang disertai tanggung jawab. Semua itu bermuara kepada kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Menurut Suyanto, program kelas unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis tidak sesuai dengan

³⁷ Fadjar, *Madrasah*, 23.

hakikat kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen.³⁸

Bila boleh mengkritisi, pelaksanaan sekolah unggulan di Indonesia memiliki banyak kelemahan. *Pertama*, sekolah unggulan di sini membutuhkan legitimasi dari pemerintah bukan atas inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat. Sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari pada muatan edukatifnya. Apabila sekolah unggulan didasari atas pengakuan masyarakat maka pemerintah tidak perlu mengucurkan dana lebih kepada sekolah unggulan, karena masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan sekolah itu. *Kedua*, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya, sementara itu golongan miskin tidak mungkin mampu mengikuti sekolah unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya penyelenggaraan sekolah unggulan bertentangan dengan prinsip equity yaitu terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan ini amat penting agar kelak melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang berkeadilan. *Ketiga*, profil sekolah unggulan kita hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi berupa NEM, input siswa yang memiliki NEM tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana sekolah yang besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah yang kesemuanya sudah unggul. Wajar saja bila bahan masukannya bagus, diproses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula maka keluarannya otomatis bagus. Yang seharusnya disebut unggul adalah apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik tetapi diproses ditempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus. Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi negeri ini.

³⁸ Kompas, *Realitas Sekolah Unggulan*, 29 April 2002, 4

3. Restrukturisasi Sekolah Unggulan

Maka konsep sekolah unggulan yang tidak unggul ini harus segera direstrukturisasi. Restrukturisasi sekolah unggulan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Pertama, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak yang memiliki bakat keunggulan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang dari tingkatan dan latar belakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya anak yang memiliki bakat keunggulan seni tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran seni.

Kedua, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam test IQ. Keunggulan seseorang dapat dijangar melalui berbagai keberbakatan seperti yang hingga kini dikenal adanya 8 macam kecerdasan (*multiple itegensies*).

Ketiga, sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak yang kaya saja tetapi menjaring semua anak yang memiliki bakat keunggulan dari semua kalangan. Berbagai sekolah unggulan yang dikembangkan di Amerika justru untuk membela kalangan miskin. Misalnya *Effectif School* yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dengan anak kaya. Demikian pula dengan *School Development Program* yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. *Accellerated School* yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi pada siswa kurang beruntung atau siswa beresiko. *Essential school* yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu.

Keempat, Madrasah/sekolah Islam unggulan harus memiliki model manajemen yang unggul yaitu yang melibatkan partisipasi semua *stakeholder* sekolah, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargasi prestasi setiap siswa berdasar kondisinya masing-masing, terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan.

Saat ini amat tepat untuk mengembangkan madrasah/sekolah unggulan karena terdapat dua suprastruktur yang mendukung. *Pertama*, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan termasuk salah satu bidang yang didesentralisasikan. Dengan adanya kedekatan birokrasi antara sekolah dengan Kabupaten/Kota diharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah unggulan semakin serius. *Kedua*, adanya UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang didalamnya memuat bahwa salah satu program pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan berbasis masyarakat/sekolah inilah warga sekolah akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah. Setiap sekolah akan menjadi sekolah unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh. Selama sekolah-sekolah hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya maka sekolah tidak akan pernah menjadi sekolah unggul. Bisa saja semua sekolah menjadi sekolah unggul yang berbeda-beda berdasarkan potensi dan kebutuhan warganya. Apabila semua sekolah telah menjadi sekolah unggul maka tidak sulit bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukannya.

Kesimpulan

Sistem penyelenggaraan madrasah adalah hasil modifikasi dari sistem penyelenggaraan pesantren karena sebelum terbentuk sistem madrasah, pada awalnya proses pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di masjid dan pesantren. Secara umum madrasah juga sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya kecuali aspek

tradisi dan kurikulum yang dilaksanakan. Posisi madrasah secara yuridis sama terutama dalam aspek kurikulum (lihat Permendiknas no. 22, 23, 24 tahun 2006), tetapi madrasah secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas Islam.

Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang yakni pertama kali didirikan pada 459 H oleh Nizam al-Mulk di Baghdad. Munculnya pendidikan madrasah pada awalnya selain dilatarbelakangi oleh motivasi agama dan motivasi ekonomi, juga motivasi politik. Di Indonesia, madrasah merupakan fenomena moderen yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia, jika dikembalikan pada situasi awal abad ke-20, dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, walaupun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah masa moderen. Keberadaan madrasah seperti sekarang ini merupakan akumulasi berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia. Mulai dari tradisi pra-sejarah atau tradisi asli, tradisi Hindu-Budha, tradisi Islam, dan tradisi barat atau moderen. Oleh sebab itu madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif, dan dalam waktu yang cukup panjang itu telah memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan Unggulan Islam di Indonesia masih perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri sehingga dalam penyelenggaraannya tidak hanya mengacu pada profit oriented namun harus didasari dengan realitas dan hati nurani.

Referensi

- Ahmad Syalabi, *History of muslim education*, Beirut, dar alkasysyaf, 1987.
- Arifin, I. 1995. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Berprestas: Studi Multi Kasus MIN Malang I, MI Manbaul ulum, dan SDN Ngalik I Batu*. Malang: PPS IKIP Malang.
- Arifin, I. 1997. *Prinsip Dan Teknik Pengorganisasian Dan Pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah*. DPD GOPTKI Jawa Timur.

- Arifin, I. 1999. Strategi Pengelolaan MI Unggulan: Analisis Evaluatif dalam Menyusun Perencanaan Strategik MI unggulan. *Jurnal pendidikan*, 26, (1), 41-49.
- Arifin, I. 1999b. *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif*. *Jurnal Pendidikan*, 9, (1), 62-69.
- Azra, Azyumardi, 1998, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos.
- _____, 1999. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta, Logos.
- Brookover, W.B., & Lozottr, L.W. 1979. *Changes in School Characteristics Coincident with Changes in School Achievement*. East Lansing: Michigan State University.
- Ditjenbimbagais. 1997. *Strategi Pembelajaran Kurikulum Madrasah 1994*. Jakarta. Ditjenbimbagais. Depag RI.
- Fadjar, Malik. 1995. *Tantangan dan peran umat Islam dalam menyongsong abad xxi*, Surabaya, Makalah IAIN Sunan Ampel.
- _____, 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Grafindo Persada dan LSIK, Jakarta Cet.2, 1996
- H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Remaja Roesdakarya, Bandung cet-4 1999*
- _____, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2000*
- Hanson, E.M. 1985. *Educational Administration And Organistion Behavior*. Boston: *Ally ang Bacon, inc*.
- Hoy, W.K. & Ferguson, J. *A Theoritcal Fremework An Explenation of Organizational Effectifness of School. Administrations Quarterly, XXI, (2) 117-132*.
- Juran, J.M 1989. *Juran of Leadeship for Quality*. New York: *Macmillan, inc*.
- Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, Vol.3. No.2. Departemen Agama, Jakarta, 1999.
- Maksum. 1999. *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos
- Mastuhu. 1994. *Dinamika sistem pendidikan pesantren*, Jakarta: INIS
- _____, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos,
- Muhaimin, *Eksistensi Madrasah sebagai sekolah Umum yang berciri khas Islam*, Tarbiyah, IAIN Malang, no. 45 tahun xiv Januari-Maret, 1997
- Mansurnoor, I.A. *Islam in Indinesian Word: Ulama of Madura*. Yogyakarta.: Gajahmaada University Press.
- Owens. R.G 1987. *Organixation Behavior In Education*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall. inc

- Sergiovanni. 1987. *The Principalship: A Reflective Practice perspective*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.
- Shaeffer, S. 1990. *Educational Change, A Case Study of Three Innovations*, IDRC-MR270e, Paris
- Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Stepen K. Sanderson. 1995. *Sosiologi Makro, sebuah pendekatan terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 11.
- Suryadi, Ace, dkk. 1992. *Indikator Mutu Dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta. Balitbangdepdikbud.
- PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
- Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan